

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

2024



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG

Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463
Sumedang - 45322

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah selesai kami susun. Penyusunan LAKIP Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selama kurun waktu satu tahun. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang didalamnya meliputi Visi dan Misi Dinas, arah kebijakan umum dan strategi kegiatan, serta program pembangunan yang dilaksanakan di SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan Daerah, kondisi lingkungan eksternal, serta evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, sehingga diharapkan implementasi program pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat lebih berdaya guna, terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua.

Sumedang, Desember 2024

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis	6
1.5. Uraian Singkat Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Perbaikan Kedepan	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1.3.1. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

1.3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

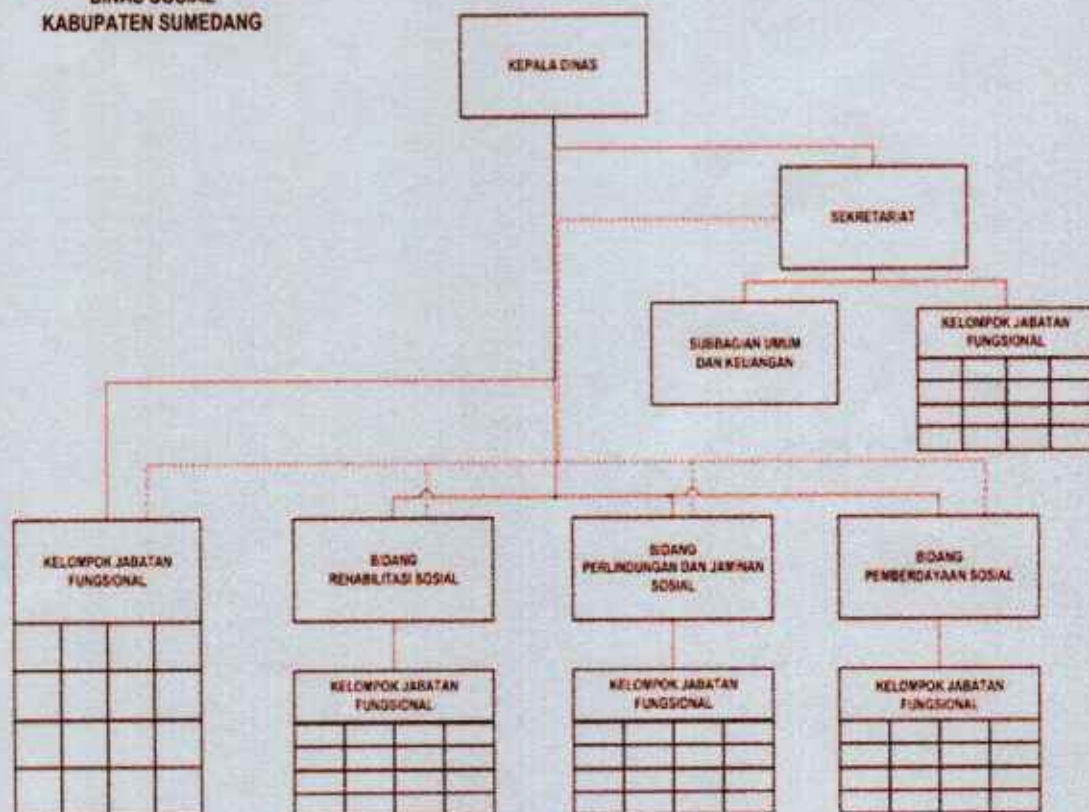
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini :

Gambar. 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG**



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Sosial yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2024-2026.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial

No	Urusan	Permasalahan
1.	SOSIAL	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum Update Tahunannya
		Jumlah Sumber Daya Manusia / Aparatur (SDM) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas / Kompetensi / Akuntabilitas
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten

No	Urusan	Permasalahan
		Pemberian / Pengusulan bantuan sosial (di luar yang bersifat kedaruratan / kasuistik) belum seluruhnya melalui mekanisme perencanaan yang terintegrasi pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
		Sarana Prasarana masih belum memadai dalam mendukung Pelayanan kesejahteraan sosial

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam Tiga Tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang harus berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Sumedang memiliki manfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.

Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2024-2026 yaitu "Sejahtera Agamis dan Demokastis (Beyond Sehati) pada Tahun 2024".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Berpendidikan, Berbudaya Dan Berpola Hidup Sehat;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Agribisnis, Pariwisata Dan Industri;

3. Mewujudkan Masyarakat Daerah Yang Berakhlak Mulia, Yang Berlandaskan Keimanan Dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang Makin Toleran Sesuai Dengan Falsafah Pancasila;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis Dalam Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-2 yaitu **Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Agribisnis, Pariwisata Dan Industri.** Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi :

Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokastis (BEYOND SEHATI) Pada Tahun 2024				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Agribisnis, Pariwisata Dan Industri	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Pendapatan Per Kapita (ADBH)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokastis (BEYOND SEHATI) Pada Tahun 2024				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk periode 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan-peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda No. 03 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana;
5. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan

mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menyusun Peraturan-peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda No. 03 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial	Penerbitan Peraturan-peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda No. 03 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal	Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui kolaborasi dengan Stakeholders terkait
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Puskesmas kolaborasi dengan Stakeholders lain melalui program Perguruan Tinggi Mandiri, Gotong Royong Membangun Desa (PTMGRMD)
4.	Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat
5.	Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan	Persentase PPKS yang terpenuhi	80	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	1.000.199.800	APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	kebutuhan Dasar nya			Program Rehabilitasi Sosial	2.972.558.000	APBD
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.677.930.000	APBD
					Program Penanganan Bencana	832.487.000	APBD
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	98.800.000	APBD
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	87	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.936.740.600	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	80
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Persen	89

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2024.

A. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

A.1 Indikator Kinerja Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kabupaten Sumedang telah berhasil melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya dengan capaian kinerja 94.41 Persen dari Target sebesar 80 Persen dan terealisasi sebesar 75.53 Persen.



Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Persen	80	75,53	94,41	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan secara rinci capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja untuk urusan sosial sebagaimana tersirat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang 2024-2026 yaitu Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya. Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-1 perencanaan (tahun 2024) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 75,53% dari target yang dicadangkan sebesar 80% sehingga

capaian kinerjanya sebesar 94,41%. Dalam artian pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 80% dari jumlah PPKS sebesar 7187 maka diperoleh target satuan sebesar 5.750 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 5.428 orang. Berikut di sajikan Target dan realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PPKS tahun 2024

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
	Jumlah PPKS	orang	7187	5428	75.53
1	Anak Bayi terlantar	orang	1	1	100
2	Anak terlantar	orang	307	62	20.20
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	orang	22	19	86.36
4	Anak jalanan	orang	5	5	100
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	orang	75	75	100
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	orang	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	13	13	100
8	Lanjut usia terlantar	orang	212	212	100
9	Penyandang disabilitas	orang	278	206	74.10
10	Tuna susila	orang	9	9	100
11	Gelandangan	orang	42	42	100
12	Pengemis	orang	7	7	100
13	Pemulung	orang	5	3	60
14	Kelompok minoritas	Kelompok	1	1	100
15	Bekas warga binaan lembaga pemasayarakatan	orang	-	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	Orang	626	138	22.04
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	orang	2	2	100
18	Korban trafficking	orang	1	1	100
19	Korban tindak kekerasan	orang	1	1	100
20	Pekerja migran bermasalah Social (PMBS)	orang	1	1	100

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
21	Korban Bencana Alam	Orang	2638	2638	100
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	509	-	-
24	Fakir miskin	orang	2432	1992	81.91
25	Keluarga bermasalah Sosial psikologis	Orang	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok	-	-	-

Sumber : Data diolah Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya



Dari segi realisasi kinerja tahun 2024 Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya meningkat sebesar 13.65% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 60.57% dan Tahun 2024 sebesar 75.53%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar-nya juga meningkat sebesar 13.65% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 80.76% dan pada tahun 2024 tercapai sebesar 94.41%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra



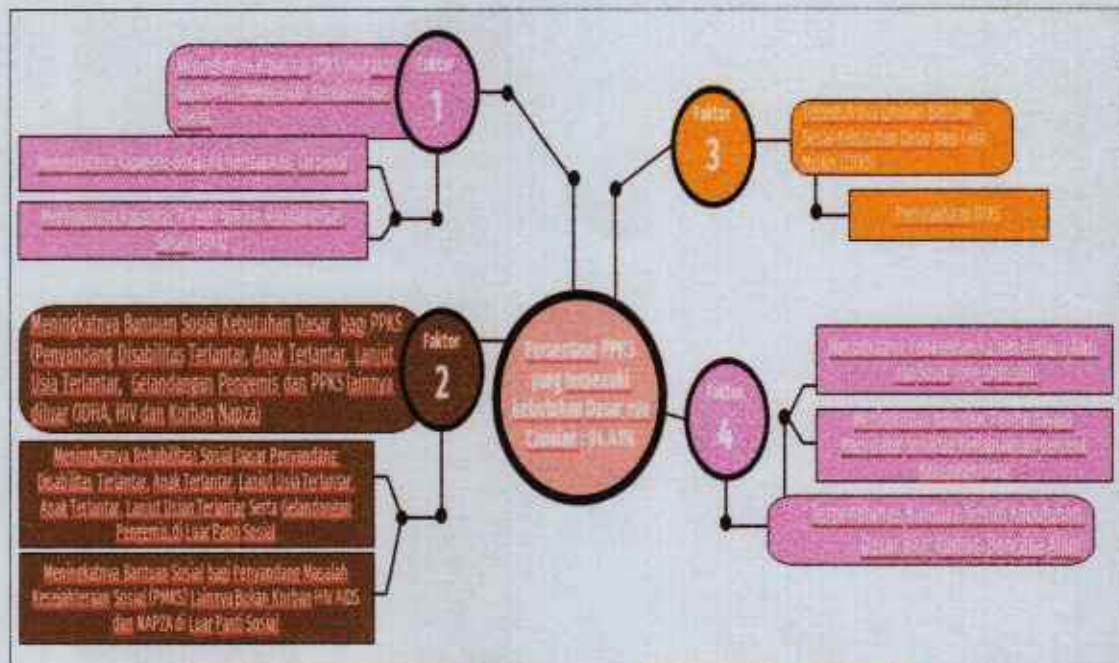
Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya, target akhir Renstra yaitu sebesar 90% terealisasi 75.53% pada tahun 2024. Sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 83,92%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Pada Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional atau Provinsi tidak bisa dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dikarenakan indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya hanya diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indicator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya sebagai berikut:

1. Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdaya dengan sasaran Sub Kegiatan Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak tercapai realisasinya dikarenakan belum terdapat sasaran Komunitas Adat Terpencil yang memenuhi kriteria sebagai Komunitas Adat Terpencil.
2. Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar dengan beberapa sasaran yang tidak tercapai targetnya antara lain:
 - a. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota memiliki target kinerja sebesar 2.352 Keluarga dan realisasi kinerja 1.939 Orang maka diperoleh capaian kinerja 82.44%. Capaian tersebut tidak tercapai target dikarenakan administrasi kependudukan tidak sesuai sejumlah 413 Orang.
 - b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki target kinerja sebesar 262.793 Keluarga dan realisasi kinerja 226,991 Keluarga maka diperoleh

capaian kinerja 86,38%. Capaian tersebut tidak tercapai target dikarenakan dari hasil pemadanan data diketahui bahwa penerima manfaat administrasi kependudukan tidak sesuai, graduasi (keluar dari DTKS), anggota keluarga yang memiliki penghasilan diatas Upah Minimum Provinsi, keluarga yang memiliki daya listrik 2.200 Watt, hasil verval dari Desa, Guru Honorer bersertifikasi dan penerima manfaat memiliki Administrasi Hukum Umum (AHU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) dianggap memiliki usaha atau pengurus organisasi terdapat 35,802 Keluarga.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi dan meningkatkan capaian Indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya untuk tahun selanjutnya sebagai berikut :

1. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota;
2. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota;
3. Memfasilitasi PPKS yang harus membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar hiv/aids kewenangan kabupaten/kota
4. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota
5. Menyediakan tempat pengungsian bagi korban bencana;
6. Melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota
7. Melakukan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan kabupaten/kota

6. Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET DPA 2024	SATUAN	TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
							FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	31.199.800	16.25	Persen	-	29.699.800	-	95.19	
	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	969.000.000	66.67	Persen	58.33	955.594.600	87	98.62	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	31.199.800	20	Kelompok	-	29.699.800	-	95.19	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	969.000.000	7	Jenis	7	955.594.600	100	98.62	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	2.972.558.800	71.66	Persen	100	2.913.116.100	139.55	98.00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	2.947.558.800	3699	Orang	3699	2.889.164.200	100.00	98.02	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	25.000.000	30	Orang	30	23.951.900	100	95.81	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	1.677.930.000	62.47	Persen	86.38	1.626.960.500	138.27	96.96	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET DPA 2024	SATUAN	TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
							FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	1,677,930,000	1	Dokumen	1	1,626,960,500	100	96.96	
PROGRAM PENANGNAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	832,487,000	100	Persen	100	824,432,210	100	99.03	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	397,427,000	100	persen	300	392,290,850	100	98.71	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	435,060,000	6	Kali	6	432,141,360	100	99.33	

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2024 sebesar Rp. 12.518.716.200,- yang terdiri dari 6 program, 41 Sub Kegiatan Sedangkan realisasinya sebesar Rp 12.060.353.977 atau 96,34%.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.942.103.236	5.620.894.767	84,83
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.000.199.800	985.294.400	98,51
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.972.558.800	2.905.472.100	97,74
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.677.930.000	1.626.960.500	96,96
5	Program Penanganan Bencana	832.487.000	824.432.210	99,03
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	98.800.000	97.300.000	98,48

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja IKU
Dinas Sosial kabupaten Sumedang Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	94,41	96,34	-	Tidak Efisien

B. Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Indikator Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah memiliki indikator sasaran sebagai berikut:

a. Zona Integritas Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran ini memiliki target kinerja pada tahun 2024 sebesar 89% diperoleh realisasi sebesar 90,60% atau capaian kinerja 104,14%.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Zona Integritas Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Bobot	LKE 2023	%
A 1	Komponen Pengungkit (Pemenuhan)	30,00	23,00	76,51
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,36	83,89
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,21	63,10
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,54	90,71
4	Penguatan akuntabilitas	5,00	4,84	96,88
5	Penguatan pengawasan	7,50	3,97	52,91
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	5,00	4,04	80,83
A2	Komponen Pengungkit (Reform)	30,00	27,79	92,64
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,75	93,75
2	Penataan Tatalaksana	3,50	3,25	92,86
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,70	94,00
4	Penguatan akuntabilitas	5,00	4,50	90,10
5	Penguatan pengawasan	7,50	7,00	93,33
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	5,00	4,59	91,75
	Jumlah A1 dan A2	60,00	50,70	84,58

No	Indikator Kinerja	Bobot	LKE 2023	%
B	Komponen Hasil	40,00	39,90	99,67
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,50	22,50	100,00
	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50	17,37	99,00
	Target Kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya	5,00	5,00	100,00
2	Pelayan Publik yang prima	17,50	14,70	84,00
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50	14,70	84,00
	TOTAL (A+B)	100,00	90,60	90,60

Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi Zona Integritas pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang antara lain :

a. Komitmen Pimpinan

Pimpinan menjadi teladan dalam membangun budaya integritas dan konsisten dalam mengawal perubahan dan memberikan arahan yang jelas serta mendorong seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif.

b. Budaya Kerja Berbasis Integritas

Membangun budaya kerja yang mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selain itu memastikan adanya reward dan punishment yang adil bagi pegawai dan mendorong adanya inovasi dan inisiatif dalam peningkatan layanan publik.

c. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menyusun dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan program dan kebijakan.

d. Partisipasi dan Pengawasan Publik

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan menyediakan akses informasi yang transparan terkait kebijakan dan pelayanan serta membuka kanal pengaduan dan menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan tepat.

e. Penggunaan Teknologi Informasi

Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Menerapkan sistem informasi manajemen yang dapat mencegah praktik korupsi dan memanfaatkan media sosial dan website sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

f. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi ZI dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan serta inovasi kebijakan. Mendorong adanya feedback dari pegawai dan masyarakat guna peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun upaya perbaikan dalam meningkatkan Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah untuk selanjutnya sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan agar seluruh anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Peningkatan manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi;
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik;
- d. Memperhatikan kompetensi jabatan dalam mutasi pegawai;
- e. Mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam rencana pengembangan kompetensi pegawai;

- f. Melakukan perbaikan secara berkala dalam hasil pengembangan kompetensi
- g. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten;
- h. Penyusunan SOP Pengendalian gratifikasi;
- i. Melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
- j. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
- k. Monitoring dan evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
- l. Penanganan benturan kepentingan harus disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;
- m. Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan
- n. Penanganan benturan kepentingan harus dievaluasi secara berkala;
- o. Mereviu dan perbaikan atas standar pelayanan;
- p. Seluruh informasi tentang pelayanan harus terintegrasi / terhubung dengan system
- q. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi harus dilakukan secara berkala;
- r. Melakukan perbaikan atas pemanfaatan Teknologi Informasi



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya sebesar 94,41% (Sangat Tinggi).
- 2) Zona Integritas Perangkat Daerah pada penilaian tahun 2024 dengan implementasi tahun 2023 memiliki target kinerja sebesar 89% diperoleh realisasi sebesar 90,60% atau capaian kinerja 104,14%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan peningkatan capaian indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya
 - a. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota;
 - b. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota;
 - c. Memfasilitasi PPKS yang harus membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar hiv/aids kewenangan kabupaten/kota

- d. Memfasilitasi PPKS yang harus mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota
 - e. Menyediakan tempat pengungsian bagi korban bencana;
 - f. Melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota
 - g. Melakukan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan kabupaten/kota
- b. Perbaikan Zona Integritas Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan agar seluruh anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Peningkatan manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik;
 - d. Memperhatikan kompetensi jabatan dalam mutasi pegawai;
 - e. Mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam rencana pengembangan kompetensi pegawai;
 - f. Melakukan perbaikan secara berkala dalam hasil pengembangan kompetensi
 - g. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten;
 - h. Penyusunan SOP Pengendalian gratifikasi;
 - i. Melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
 - j. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

- k. Monitoring dan evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
- l. Penanganan benturan kepentingan harus disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;
- m. Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan
- n. Penanganan benturan kepentingan harus dievaluasi secara berkala;
- o. Mereviu dan perbaikan atas standar pelayanan;
- p. Seluruh informasi tentang pelayanan harus terintegrasi / terhubung dengan system
- q. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi harus dilakukan secara berkala;
- r. Melakukan perbaikan atas pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumedang, Desember 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

H. DIKDIK SADIKN, A.K.S, M.Si

NIP. 19720515 199803 1 010

insun meo

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01. - DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

1 - 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.518.716.200,00	12.252.845.292,00	97,88	16.665.121.443,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.947.199.400,00	11.682.414.592,00	97,78	16.203.890.445,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.997.279.700,00	3.928.864.192,00	98,29	3.821.801.728,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.917.199.700,00	1.895.850.858,00	98,89	1.891.370.822,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.491.319.296,00	1.481.589.896,00	99,35	1.481.561.980,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.491.319.296,00	1.481.589.896,00	99,35	1.481.561.980,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.891.294,00	139.171.794,00	96,72	137.447.540,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.891.294,00	139.171.794,00	96,72	137.447.540,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.070.000,00	140.070.000,00	97,90	130.890.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.070.000,00	140.070.000,00	97,90	130.890.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	11.440.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	11.440.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.870.000,00	33.370.000,00	93,03	39.530.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.870.000,00	33.370.000,00	93,03	39.530.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.256.300,00	73.433.880,00	98,89	81.617.340,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.256.300,00	73.433.880,00	98,89	81.617.340,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.201.966,00	20.636.274,00	97,33	8.866.662,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.201.966,00	20.636.274,00	97,33	8.866.662,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.844,00	19.014,00	61,65	17.300,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.844,00	19.014,00	61,65	17.300,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.060.600.000,00	2.018.293.334,00	97,95	1.905.120.906,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.244.080.000,00	1.214.136.000,00	97,59	1.327.980.461,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.244.080.000,00	1.214.136.000,00	97,59	1.327.980.461,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	816.520.000,00	804.157.334,00	98,49	577.140.445,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	816.520.000,00	804.157.334,00	98,49	577.140.445,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.480.000,00	14.720.000,00	75,56	25.310.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	19.480.000,00	14.720.000,00	75,56	25.310.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.480.000,00	14.720.000,00	75,56	25.310.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.966.419.700,00	4.770.050.400,00	96,05	5.542.688.717,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.247.948.700,00	1.236.550.233,00	99,09	1.093.219.510,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.244.774.100,00	1.233.375.633,00	99,08	1.093.219.510,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.102.300,00	9.102.300,00	100,00	6.158.420,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	166.700,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	163.720.000,00	163.720.000,00	100,00	148.317.500,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	63.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	86.688.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.725.400,00	40.598.200,00	99,69	61.146.550,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	46.647.000,00	46.647.000,00	100,00	65.517.490,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	98.602.200,00	98.503.583,00	99,90	89.692.360,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.996.400,00	1.709.200,00	85,61	2.560.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.462.000,00	14.461.400,00	100,00	23.171.300,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.851.600,00	16.851.600,00	100,00	31.838.330,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.336.300,00	8.336.300,00	100,00	2.999.720,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.113.100,00	8.113.100,00	100,00	7.630.940,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	400.300.000,00	398.791.500,00	99,62	-
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	169.710.300,00	167.833.950,00	98,89	199.213.200,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	187.820.000,00	187.820.000,00	100,00	253.630.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	7.680.000,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	63.950.000,00	56.450.000,00	88,27	34.480.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	46.800.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.137.500,00	8.137.500,00	100,00	25.466.000,00
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.174.600,00	3.174.600,00	100,00	-
5.1.02.01.04.0117.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.174.600,00	3.174.600,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.048.433.000,00	2.894.993.547,00	94,64	3.674.151.122,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.911.093.500,00	2.750.872.687,00	94,50	3.482.737.874,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	176.000.000,00	136.000.000,00	77,27	182.700.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	191.150.000,00	80.500.000,00	42,11	211.800.000,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.526.700.000,00	1.522.950.000,00	99,75	1.736.400.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	423.000.000,00	423.000.000,00	100,00	415.500.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.000.000,00	117.903.000,00	99,92	106.400.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	153.400.000,00	153.354.000,00	99,97	126.638.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	52.450.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	34.000.000,00	33.950.000,00	99,85	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	150.000.000,00	149.990.000,00	99,99	533.025.500,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	143.200,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.228.000,00	3.042.684,00	94,26	14.234.845,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	7.456.500,00	6.184.850,00	82,95	8.405.250,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	36.432.000,00	35.139.753,00	96,45	31.652.279,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.392.000,00	10.392.000,00	100,00	9.624.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	10.594.600,00	88,29	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.000.000,00	19.536.800,00	93,03	17.164.800,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	19.535.000,00	19.535.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Turan Jaminan/Asuransi	18.360.000,00	15.441.360,00	84,10	10.171.248,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.360.000,00	15.441.360,00	84,10	10.171.248,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.371.500,00	21.371.500,00	100,00	40.750.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00	29.950.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.913.000,00	5.913.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	3.548.000,00	3.548.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.133.000,00	4.133.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.747.500,00	3.747.500,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.708.000,00	15.708.000,00	100,00	44.192.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.708.000,00	15.708.000,00	100,00	44.192.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	81.900.000,00	81.600.000,00	99,63	96.300.000,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	81.900.000,00	81.600.000,00	99,63	96.300.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	99.530.000,00	99.529.120,00	100,00	38.700.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.530.000,00	99.529.120,00	100,00	38.700.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	67.750.000,00	67.749.120,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	4.560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	5.110.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	4.830.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	570.508.000,00	548.977.500,00	96,23	736.618.085,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	570.508.000,00	548.977.500,00	96,23	736.618.085,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425.523.000,00	424.277.500,00	99,71	613.928.085,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.985.000,00	124.700.000,00	86,01	122.690.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.983.500.000,00	2.983.500.000,00	100,00	6.839.400.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	4.470.970.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	4.070.100.000,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	4.070.100.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	400.870.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	400.870.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	699.000.000,00
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	699.000.000,00
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	699.000.000,00
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.813.500.000,00	1.813.500.000,00	100,00	1.669.430.000,00
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.813.500.000,00	1.813.500.000,00	100,00	1.669.430.000,00
5.1.06.04.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.813.500.000,00	1.813.500.000,00	100,00	1.669.430.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	571.516.800,00	570.430.700,00	99,81	461.230.998,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.685.800,00	275.980.700,00	99,75	230.377.590,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	206.640.500,00	206.240.500,00	99,81	132.736.390,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80	31.499.260,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	-	-	-	5.449.260,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80	26.050.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.640.500,00	6.640.500,00	100,00	101.237.130,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	93.407.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.640.500,00	6.640.500,00	100,00	2.580.830,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	5.249.300,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	14.000.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	14.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	2.230.800,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	-	2.230.800,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	2.230.800,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	53.045.300,00	52.740.200,00	99,42	81.410.400,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	43.168.800,00	42.998.800,00	99,61	64.500.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	43.168.800,00	42.998.800,00	99,61	64.500.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.876.500,00	9.741.400,00	98,63	16.910.400,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.876.500,00	9.741.400,00	98,63	16.910.400,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	294.831.000,00	294.450.000,00	99,87	230.853.408,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	294.831.000,00	294.450.000,00	99,87	230.853.408,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	294.831.000,00	294.450.000,00	99,87	230.853.408,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	294.831.000,00	294.450.000,00	99,87	230.853.408,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.518.716.200,00)	(12.252.845.292,00)	97,88	(16.665.121.443,00)

Sumedang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

H. DIKDIK SADIKN, A.K.S.N.Si

197205461998081010



EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS SOSIAL

TRIMULAN IV

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENCANA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						I	II	III	IV			FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)		5.836.740,600									5.763.461,062	100,00	97,08	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	107.340,900	100	100	Persen	25	25	25	25	100,00	91.099,983	100,00	84,83	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	4.020.034,400	100	100	Persen	25	25	25	25	100,00	3.895.378,802	100,00	97,89	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah yang memadai	12.290,700	100	100	Persen	25	25	25	25	100,00	5.790,700	100,00	47,11	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	438.351,800	100	100	Persen	25	25	25	25	100	419.351,800	100,00	98,10	
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	273.105,300	100	100	Persen	25	25	25	25	100	271.720,200	100,00	99,49	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	528.226,500	100	100	Persen	25	25	25	25	100	484.943,587	100,00	91,81	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	559.391,000	100	100	Persen	25	25	25	25	100	555.215,920	100,00	99,25	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIMULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107,340,900	19	19	Laporan	5	4	5	5	19	91,059,983	100.00	84.83	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,874,000	4	7	Dokumen	1	2	3	1.00	7	38,873,283	100.00	90.67	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	9,452,400	3	2	Dokumen	1	-	-	1	2	7,853,200	100	83.08	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4,322,500	2	1	Dokumen	-	-	-	1	1	2,723,300	100	63.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,270,000	1	2	Dokumen	-	1	1	-	2	4,688,200	100.00	74.77	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,422,000	19	19	Dokumen	3	5	6	5	19	36,922,000	100.00	83.12	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,020,034,400	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	3,935,378,892	100.00	97.89	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,977,799,700	50	26	Orang	26	26	26	26	26	3,914,144,192	100	98.40	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	20,863,100	12	12	Dokumen	3	3	3	3	12	10,363,100	100	49.67	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21,171,600	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	10,871,600	100	50.87	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20,480,900	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	20,480,900	100	87.17	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,456,000	2	2	Laporan	-	1	-	1	2	2,456,000	100	45.01	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,004,900	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	18,004,900	100	72.01	



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,290,700	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	5,790,700	100	47.11	
Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,290,700	15	10	Dokumen	2	3	3	3	11	5,790,700	110	47.11	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	405,890,900	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	398,890,900	100	98.28	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,336,300	1	1	Paket	1	1	-	-	1	8,336,300	100	100.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,633,200	1	12	Paket	3	3	3	3	12	29,633,200	100	100.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,654,500	1	12	Paket	3	3	3	3	12	21,654,500	100	100.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,998,800	1	10	Dokumen	2	3	2	3	10	58,998,800	100	100.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43,277,100	1	12	Laporan	3	3	3	3	12	43,277,100	100	100.00	
Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,392,000	7	12	Dokumen	3	3	3	3	12	10,392,000	100	100.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212,479,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	212,479,000	100	100.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11,040,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	11,040,000	100	73.40	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan yang Melaksanakan Sistem Elektronik pada SKPD	5,080,000	4	4	Laporan	1	1	1	1	4	2,080,000	100	40.94	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	273,105,300	12	2	Laporan	1	1	-	-	2	271,720,200	100	99.49	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273,105,300	8	2	Laporan	1	1	-	-	2	271,720,200	100	99.49	
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528,226,500	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	484,943,587	100	91.81	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	45,916,500	1	12	Laporan	3	3	3	3	12	43,174,587	100	94.03	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	482,310,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	441,769,000	100	91.59	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559,391,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	555,215,920	100	99.25	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252,450,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	250,985,920	100	99.42	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Lainnya	8,080,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	8,060,000	100	100.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298,861,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	296,150,000	100	99.09	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIMULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN SOSIAL		6,581,975,600									6,447,103,210		97.95	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	31,199,800	16.25	16.25	Persen	-	-	-	-	-	29,699,800	-	95.19	
	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	969,000,000	88.67	88.67	Persen	8.33	16.67	8.33	25.00	58.33	955,594,600	87	88.82	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	31,199,800	20	20	Kelompok	-	-	-	-	-	29,099,800	-	95.19	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	31,199,800	350	200	Keluarga	-	-	-	-	-	29,699,800	-	95.19	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	969,000,000	7	7	Jenis	1	2	1	3	7	955,594,600	100	88.82	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000	277	63	Orang	63	-	-	-	63	73,160,000	100	97.53	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	44,500,000	26	26	Lembaga	-	-	26	-	26.00	38,600,000	100	86.74	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	819,500,000	277	277	Lembaga	277	277	277	-	277	814,344,600	100	99.37	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	30,000,000	17	17	Lembaga	-	17	-	-	17	29,500,000	100	98.33	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIMULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	2,972,558,800	71.88	71.88	Persen	35.83	42.53	12.17	9.68	100	2,913,118,100	138.55	98.00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	2,947,558,800	3699	3699	Orang	1318	1573	460	358	3699	2,889,164,200	100.00	98.02	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Pemakanan	2,147,169,300	2393	407	Orang	350	407	350	350	407	2,127,188,400	100	99	Panti = Atensi
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang	46,600,000	31	31	Orang	3	13	7	8	31	46,579,000	100	100	Kedaruratan
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	259,000,000	160	162	Orang	37	32	93		162	256,511,200	100	99	Atensi
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	58,644,000	200	100	Persen	100	100	100	100	400	42,034,000	100	72	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	46,600,000	50	30	Orang	-	30		-	30	44,700,000	100	96	Peserta Pelatihan + Adopsi
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	46,600,000	50	50	Orang	-	50	-	-	50	44,700,000	100	96	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberian Layanan Data dari Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	226,275,600	2300	1554	Orang	728	826	37	-	1564	221,525,800	100	98	
Pemberian Layanan Kederuratan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Kedaruratan Kabupaten/Kota	69,900,000	150	33	Orang	-	15	18	-	33	69,896,000	100	100	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	46,770,000	1300	100	Persen	100	100	100	100	100	36,030,000	100	77	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	25,000,000	30	30	Orang	-	30	-	-	30	23,951,900	100	95.81	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	20	30	Orang	-	30.00	-	-	30	23,951,900	100	95.81	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	1,677,930,000	62.47	62.47	Persen	20.68	20.70	18.32	96.38	86.38	1,628,960,500	138.27	96.96	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	1,677,930,000	5	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1,628,960,500	100	96.96	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	111,000,000	175,000	2,352	Keluarga	-	1,763	1,939	1,599	1,939	87,000,000	82.44	78.38	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	295,930,000	175,000	262,793	Keluarga	54,351	54,408	48,145	226,991	226,991	222,528,500	86.38	92.75	
Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	1,327,000,000	1000	600	Orang	-	-	600	-	600.00	1,317,432,000	100.00	99.28	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	832,487,000	100	100	Persen	100	-	100	100	100	824,432,210	100	98.03	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	397,427,000	100	100	persen	100	-	100	100	300	392,290,850	100	98.71	
Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Perumahan	350,827,000	3000	455	orang	74	-	166	215	455	346,800,850	100	98.85	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	45,600,000	400	60	Orang	-	-	4	66	60	45,490,000	100	97.62	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	435,060,000	6	6	Kali	2	1	2	1	6	432,141,360	100	99.33	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	435,060,000	68	68	Orang	68	68	68	-	68	432,141,360	100	99.33	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2024	TARGET DPA 2024	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				TOTAL REALISASI FISIK 2024	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KET
						TRIMULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	98,800,000	100	100	Persen	100	100	100	100	100	97,300,000	100	98.48	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara	98,800,000	3	3	Lokasi	3	3	3	3	3	97,300,000	100	98.48	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	70,000,000	3	3	Makam	3	3	3	3	3	68,500,000	100	97.86	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Pelugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	28,800,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	28,800,000	100	100.00	
		12,518,716,200	100	100							12,210,564,292	97.33	97.54	

